

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan dalam ranah praksis dipandang sebagai suatu proses kemanusiaan dan pemanusiaan. Menurut Danim (2006: 4) dikatakan bahwa “pendidikan merupakan proses pemanusiaan menuju insan yang bernilai secara kemanusiaan.” Dengan kata lain, agenda utama pendidikan adalah proses memanusiaikan manusia menjadi manusia.

Sebagai sebuah agenda proses pemanusiaan dan kemanusiaan, pendidikan dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai proses pendewasaan peserta didik untuk hidup pada alam demokrasi dan memasuki sektor ekonomi produktif. Oleh karena itu, agar dapat memenuhi tujuan utama pendidikan maka diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat dihasilkan output pendidikan yang *link and match* dengan kebutuhan riil pasar kerja.

Dipandang dari aspek ekonomi, format dasar pemanusiawian pendidikan adalah terpenuhinya keunggulan akademik, ketrampilan vokasional, dan keunggulan pribadi sebagai wirausaha yang fungsional bagi kehidupan lulusan. Melalui format dasar ini, kehadiran praksis pendidikan yang manusiawi akan menggeser paradigma kinerja sekolah dari *back to basics* menuju ke *forward to future basics*. Sedangkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, perlu ditingkatkan kualitas manajemen pendidikan. Berkaitan dengan masalah ini, Engkoswara

(2001: 5) menyebutkan bahwa “Manajemen Pendidikan yang diharapkan menghasilkan pendidikan yang produktif, yaitu efektif dan efisien, memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital dalam berbagai dimensi kehidupan yang berlaku untuk kurun waktu yang cukup ketika manusia hidup.”

Di Indonesia, pendidikan dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 (ayat 1) Undang Undang No. 20 tahun 2003. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Adapun jalur pendidikan formal tersebut memiliki tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar, menengah dan jenjang pendidikan tinggi.

Jenjang pendidikan dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang paling penting. Hal ini dikarenakan bahwa jenjang ini menjadi landasan bagi pendidikan pada tingkat berikutnya. Terkait dengan hal ini, Tilaar (2005: 8), menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan basis dari pembangunan manusia, oleh karena itu merupakan suatu keharusan apabila pengelolaannya menjadi tanggungjawab pemerintah.

Pentingnya pendidikan dasar juga menjadi perhatian seluruh dunia. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (*Organization for Economic Cooperation and Development/ OECD*) bahkan mencanangkan adanya kewajiban agar seluruh anak memperoleh pendidikan dasar pada tahun 2015. Pada tahun 1996, OECD mencanangkan pentingnya pendidikan dasar dengan pernyataannya bahwa *‘there should be universal primary education*

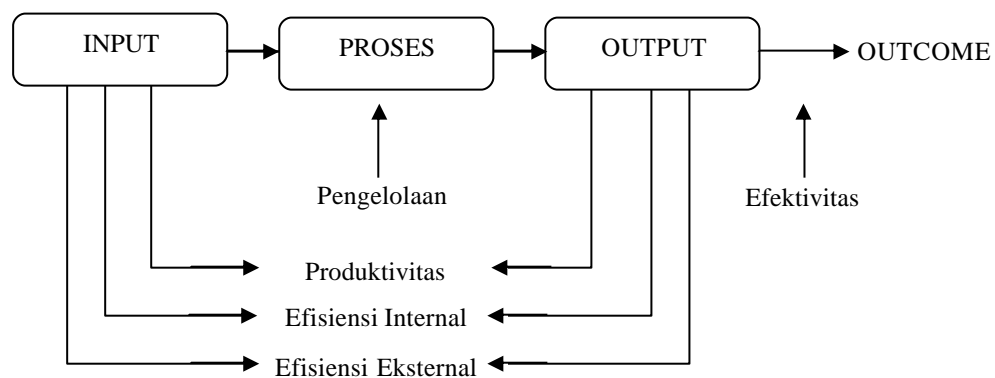
(*UPE*) in all countries by 2015” (Coulson, 2003). Pernyataan tersebut dipertegas kembali dalam Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal pada tahun 2000.

Penyelenggaraan pendidikan dasar tidak dapat dilakukan secara asal saja hanya dengan mementingkan kuantitas dengan mengabaikan kualitas. Hal ini disebabkan karena cepat lambatnya pembangunan suatu negara sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada. Di sisi lain, pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan oleh kualitas pendidikan. Untuk itu penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan kualitas selain kuantitas.

Berbicara mengenai mutu pendidikan, Sukmadinata dkk., (2006: 8) menjelaskan bahwa banyak sekali masalah mutu yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Permasalahan tersebut antara lain meliputi mutu lulusan, mutu pengajaran, mutu bimbingan dan latihan guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Lebih lanjut Sukmadinata, dkk., menjelaskan bahwa seluruh kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan (*output*) (Sukmadinata, dkk., 2006: 8).

Mutu lulusan (*output*) sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa input dan proses yang ada dalam proses persekolahan. Faktor-faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya kinerja sekolah meliputi faktor *input* dan

proses. Hal ini dikemukakan oleh Slamet (dalam Komariah dan Triatna, 2005: 7) yang menyatakan bahwa “kinerja sekolah adalah pencapaian atau prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses persekolahan.”. Lebih lanjut, Slamet (2003: 3) menjelaskan bahwa kinerja sekolah diukur dari efektivitasnya, kualitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, surplusnya, dan moral kerjanya. Berdasarkan pandangan tersebut, Slamet menjelaskan tentang kinerja sekolah sebagai bagan *input – proses – output – outcome* sebagai berikut.



Gambar 1 Bagan Kinerja Sekolah
(Sumber: Slamet, 2003: 3)

Berdasarkan bagan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas sekolah adalah ukuran yang menyatakan sejauhmana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, waktu) telah dicapai. Dalam bentuk persamaan, efektivitas adalah sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan. Sekolah yang efektif pada umumnya menunjukkan kedekatan/kemiripan antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan.

Penelitian efektivitas pendidikan sangat bervariasi menurut penekanan yang diletakkan pada berbagai kondisi yang mendahului *output* pendidikan.

Salah satu kajian dalam penelitian pendidikan adalah kajian ekonomis tentang fungsi produksi pendidikan (Scheerens, 2003: 30). Fokus utama pendekatan ekonomi terhadap efektivitas pendidikan adalah pertanyaan mengenai *input* perangkat lunak yang dapat meningkatkan *output*. Penelitian tersebut berkaitan dengan suatu fungsi yang bisa menunjukkan dengan tepat bagaimana suatu perubahan *input* akan mempengaruhi *output*.

Pemikiran ini mengarah pada upaya pengelolaan program sekolah yang harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggungjawabnya masing - masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada.

Sekolah harus mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya (kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melalui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program - program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing - masing. Sekolah harus menentukan target mutu untuk tahun berikutnya. Dengan demikian sekolah secara mandiri tetapi masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab

terhadap pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat.

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, baik produk dan jasa maupun pelayanan yang mampu bersaing di lapangan kerja yang ada dan yang diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang dilakukan melalui sekolah. Hal ini sesuai dengan pandangan Davies (2002: 197) yang menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan, sekolah secara tradisional memberikan modal intelektual (*intellectual capital*) sedangkan keluarga memberikan modal sosial (*social capital*). Adanya perubahan dalam pola penerimaan tenaga kerja dan pertumbuhan konsumerisme berakibat terhadap adanya perubahan modal sosial yang mendukung anak.

“In the educational context, schools traditionally provided the ‘intellectual capital’, literacy, numeracy, and scientific understanding, while the family provided the social capital. The change in employment patterns, the breakdown of traditional family groupings, the decline of religious practice and the growth of consumerism have all impacted on social capital supporting the child” (Davies, 2002: 197).

Salah satu aspek peningkatan mutu sekolah adalah pengelolaan sekolah yang efektif. Konsep pengelolaan sekolah efektif menurut Squires dkk., (2003: 6) dikatakan bahwa dalam sekolah efektif *“students are expected to reach the goals set for them. Students’ success is built into lessons, and teachers provide consistent rewards for demonstrated achievement”*. Berdasarkan pandangan Squires dkk., sekolah efektif pada umumnya mempunyai suatu standard disiplin yang seragam yang dipelihara oleh para guru dan pengelola sekolah.

Pengelolaan sekolah efektif diyakini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian apabila seluruh sekolah dapat melaksanakan pengelolaan sekolah secara efektif maka permasalahan yang berkaitan dengan pemerataan kualitas pendidikan dapat segera teratasi.

Salah satu pendidikan tingkat sekolah dasar di Kecamatan Jebres yang dipandang sebagai sekolah unggulan adalah SD Negeri Bulukantil Kecamatan Jebres. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sekolah ini mampu meraih berbagai prestasi baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Ditinjau dari sisi pendaftaran siswa baru, sekolah ini selalu menjadi pilihan utama orang tua siswa dalam menyekolahkan putra-putrinya saat mereka lulus dari Taman Kanak-kanak.

Hal lain yang menjadikan sekolah ini dipandang sebagai sekolah unggulan adalah adanya kenyataan bahwa setelah adanya pergantian kepala sekolah dari kepala sekolah lama kepada kepala sekolah baru, kondisi sekolah maju dengan sangat pesat.

Sebagai salah satu sekolah percontohan, pengelolaan sekolah di sekolah ini selalu menjadi sorotan dari sekolah-sekolah lain di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Meskipun demikian, mengingat keterbatasan sumberdaya manusia yang ada, sekolah ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengelolaan sekolah.

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam pengelolaan sekolah di sekolah ini berkaitan dengan aspek pembiayaan. Guna membiayai berbagai kegiatan persekolahan tentu saja dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi, di sisi lain adanya peraturan pemerintah yang melarang sekolah untuk

menarik dana dari orang tua menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sekolah.

Pengelolaan sekolah di SD Negeri Bulukantil Kecamatan Jebres dipandang paling maju di Kecamatan Jebres. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji pengelolaan sekolah di sekolah ini dengan membandingkan dengan sekolah lain di daerah yang sama tetapi memiliki kualitas yang berbeda

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengelolaan program sekolah efektif di SD Negeri Bulukantil Kecamatan Jebres. Dari fokus tersebut kemudian dituliskan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik pengelolaan program sekolah di SD Negeri Bulukantil Kecamatan Jebres?
2. Bagaimana karakteristik faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan program sekolah di SD Negeri Bulukantil Kecamatan Jebres Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik pengelolaan program sekolah di SD Negeri Bulukantil Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan program sekolah di SD Negeri Bulukantil Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pengkajian pengelolaan program sekolah khususnya yang berkaitan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berguna untuk menemukan bentuk pengelolaan program sekolah yang cocok dalam bidang pengembangan ilmu. Bagi pengembangan ilmu bermanfaat antara lain : (a) menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama tentang pengelolaan program sekolah, (b) peneliti dapat menyumbangkan gagasan yang berkaitan dengan pengelolaan program sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, (c) hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengelola Pendidikan :

- 1) Temuan ini dapat dijadikan pertimbangan kebijakan dan bermanfaat bagi pengelola pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- 2) Pengelola pendidikan dapat mengambil kebijakan tentang pemecahan masalah secara tepat, efektif dan efisien dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi sekolah.

b. Bagi Kepala Sekolah dan Guru :

- 1) Kepala sekolah dan guru dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka atas dasar temuan ini.
- 2) Pengetahuan kepala sekolah dan guru meningkat dan mempunyai wawasan yang lebih luas, sehingga dapat bermanfaat misalnya untuk memperbaiki kelemahannya.